

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2008-2012

### *Factors Affecting Inequality in East Java in Years 2008 - 2012*

Susi Lestari

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: [susilestari@gmail.com](mailto:susilestari@gmail.com)

#### Abstrak

Penelitian ini dilakukan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan tahun 2008-2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *explanatory*, yaitu menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda (*multiple linier regression method*) dengan model *Panel Data* yang diturunkan dari teori *Indeks Williamson*. Hasil Analisis menunjukkan variabel Pertumbuhan ekonomi (prob. 0,0000), inflasi (prob. 0,0000), dan variabel jumlah penduduk (prob. 0,0000) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat  $R^2$  sebesar 0,947557 atau 94,75 persen.

**Kata Kunci:** *Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, Jumlah Penduduk, Ketimpangan pendapatan*

#### Abstract

*This research was conducted in 38 regencies/cities in East Java in order to determine the effect of economic growth, inflation and population on income inequality in 2008-2012. The research used explanatory method, which explains the causal relationship between independent variables and dependent variables using secondary data obtained from Central Bureau of Statistics of East Java. Data analysis used Multiple Linear Regression Analysis with data panel model derived from the theory of Williamson Index. The analysis results showed that economic variables of growth (prob. 0.0000), inflation (prob. 0.0000), and population (prob. 0.0000) had a significant positive effect on income inequality. This was evidenced by  $R^2$  level of 0.947557 or 94.75 percent.*

**Keywords :** *economic growth, inflation, population, income inequality*

#### Pendahuluan

Tolak ukur pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian suatu wilayah (Mohammad et al, 2013). Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan dua tujuan pembangunan yang seharusnya dapat dicapai secara bersamaan dalam proses pembangunan ekonomi (Rachmad, 2013).

Permasalahan umum yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah (Tambunan, 154:2001). Ketimpangan distribusi pendapatan didorong oleh beberapa faktor yaitu inflasi, pengangguran, kemiskinan, kebijakan fiskal terutama tingkat pajak, ketidakmerataan distribusi penguasaan lahan pertanian, distribusi pendidikan angkatan kerja dan distribusi pendapatan yang berasal dari sektor pertanian (Rusli, 1996). Studi tentang ketimpangan distribusi pendapatan pertama

kali di perkenalkan oleh Profesor kuznets pada tahun 1955. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketidakmerataan

dari distribusi pendapatan adalah *Gini coefficient* yang dibantu dengan menggunakan *Lorentz curve* (Todaro, 89:2000). Di Indonesia upaya untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan ukuran koefisien gini relative berhasil. Hal ini ditandai dengan nilai koefisien gini yang mengalami penurunan dari 0,38 persen pada tahun 1978 menjadi 0,32 persen pada tahun 1990 (World Bank, dalam Moer, 1995). Selanjutnya pada tahun 1975 menganalisis hubungan kesenjangan wilayah dengan tingkat perkembangan ekonomi. Hasil analisisnya adalah nilai indeksnya terus meningkat bagi negara-negara yang tingkat perkembangan ekonominya semakin tinggi (Sabda, 2013).

Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita tinggi tidak menjadi suatu jaminan untuk mengurangi bahkan menghilangkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan absolut (Sadono, 1978). Dengan kata lain, pertumbuhan GNP per kapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini disebut dengan proses "*trickle down effect*" dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan (Arsyad, 1988).

Pada tahun 2012 pertumbuhan PDRB Jawa Timur sebesar 7,2 persen atau lebih besar dari PDRB Nasional hanya

sebesar 6,5 persen (BPS Jatim). Dilihat dari besaran angka PDRB tersebut, Indeks ketimpangan Jatim sebesar 115,14 atau masih tinggi sekali dari target yang dicanangkan Pemerintah sebesar 114,7 sampai 115,1 di tahun 2012. Jika indeks ini semakin tinggi maka daerahnya semakin timpang. Disparitas itu terjadi di Sampang, Pameksan, Situbondo, Bondowoso, Trenggalek, Pacitan yang sangat jauh tingkat kesejahteraannya dibandingkan dengan Surabaya atau Malang (Kabarbisnis, 2012).

Dari upah minimum regional (UMR) 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2012, UMR tertinggi adalah Kota Surabaya dan Kota Gresik sebesar Rp 1.257.000 dan UMR terendah adalah Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp 750.000. Akan tetapi, ketimpangan distribusi pendapatan dengan *Indeks Williamson* tertinggi justru terjadi di Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember yang sama-sama sebesar 0,45 persen. *IW* terendah adalah Kota Blitar dan Kota Madiun sebesar 0,10 persen dengan UMR yang tidak terlalu besar yaitu Rp 815.000 dan 812.500. Pada era kepemimpinan gubernur Imam Utomo tahun 2002, ketimpangan sebagian besar berada di selatan pulau Jawa. Dengan dibangunnya jalan lintas selatan (JLS) ketimpangan di selatan Jawa mulai berkurang (Jatimprov, 2015).

Pertumbuhan ekonomi Jawa timur yang tinggi bukanlah suatu jaminan ketimpangan pendapatan besarnya kecil antar Kabupaten/Kota, akan tetapi pertumbuhan ekonomi menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi Pemerintah Daerah sebagaimana telah dijabarkan di atas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seyogyanya mampu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat pula.

Pertumbuhan ekonomi atau produk domestik regional bruto (PDRB) 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012 berdasarkan harga konstan tahun 2000, dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Batu sebesar 8,26 Persen atau jauh melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hanya 7,2 persen. Pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Bojonegoro sebesar 5,82 persen. Peningkatan pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi percepatan pembangunan di masing-masing wilayah. Akan tetapi ketimpangan pendapatan justru terjadi di Jatim ditandai dengan besarnya masyarakat miskin yang diperoleh dari pembagian PDRB dengan jumlah penduduk (Aldian, 2014). Kemiskinan sebagian besar terjadi pada penduduk yang bekerja di sektor pertanian (63 persen) (BPS Jatim, 2015).

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah inflasi yang berdampak secara makro khususnya penyebab kenaikan harga-harga yang berdampak menyeluruh atau *universal* sehingga daya beli atau konsumsi masyarakat menurun (Irwansyah, 2014).

Tingkat inflasi antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012, tertinggi pada Kabupaten Madiun sebesar 8,50 persen dan terendah pada Kabupaten Sumenep sebesar 2,73 persen. Besaran tingkat inflasi mempengaruhi ketimpangan pendapatan, dimana Inflasi secara langsung mempengaruhi kinerja (menurunkan laba) perusahaan disektor riil, karena meningkatkan biaya produksi, serta menurunkan daya beli masyarakat (Hendarmin, 2012).

Sumber daya manusia atau penduduk dapat menjadi faktor pendorong terjadinya ketimpangan pendapatan. Menurut Lily (2013) Produk domestik regional bruto Jawa timur dapat diibaratkan sebagai kue wilayah (*pendapatan*). Penduduk diibaratkan jumlah orang yang akan menyantap kue wilayah tersebut. Dengan demikian, pendapatan per kapita dapat diibaratkan porsi kue yang siap disantap oleh tiap-tiap orang. Ketiga hal ini memiliki hubungan yang sangat erat. Jika kuenya besar dan jumlah orang yang menyantap sedikit, setiap orang memiliki kemungkinan memperoleh bagian kue yang lebih besar. Jika orang yang akan menyantap banyak, bagian kue untuk tiap orang menjadi kecil. Jika kuenya kecil, walaupun yang akan menyantap sedikit, bagian dari tiap orang akan tetap kecil. Apabila kuenya kecil, yang akan menyantap banyak, dapat dibayangkan betapa kecilnya bagian yang akan diperoleh oleh tiap orang. Hal itu adalah gambaran sederhana dari jumlah penduduk Jawa timur pada tahun 2012 sebanyak 37.879.713 juta jiwa dengan luas wilayah 47.922 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk miskin sebesar 5.227.318 juta jiwa (BPS Jatim, 2013). Karakteristik dan kondisi di 38 Kabupaten/Kota provinsi Jawa timur sangat beragam dan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya menjadikan wilayah tersebut mengalami pembangunan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang berbeda juga (Arsyad, 2001).

Jumlah penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota Jawa Timur tertinggi adalah kota Surabaya sebanyak 2.791.761 juta jiwa dengan luas wilayah 374,8 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Tulungagung sebanyak 99.964 jiwa dengan luas wilayah 1.055,65 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar terjadinya ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2012 ?
2. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi tiap-tiap Kabupaten/Kota terhadap ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2012 ?
3. Seberapa besar pengaruh inflasi tiap-tiap Kabupaten/Kota terhadap ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2012 ?
4. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk tiap-tiap Kabupaten/Kota terhadap ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2012 ?

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis besar kecilnya ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2012;
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi tiap-tiap Kabupaten/Kota terhadap ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2012;
3. Untuk menganalisis pengaruh inflasi tiap-tiap Kabupaten/Kota terhadap ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2012;
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk tiap-tiap Kabupaten/Kota terhadap ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2012;

## Metode Penelitian

## Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian yang menggunakan metode *explanatory* yaitu menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel bebas dan variabel-variabel terikat serta pengaruh antara dua variabel atau lebih melalui pengujian hipotesa (Sugiyono, 2012: 11).

## Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kesenjangan pendapatan sebagai variabel terikat (*dependent variabel*), sedangkan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, angka partisipasi kasar dan inflasi masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebagai variabel bebas (*independent variabel*) selama kurun waktu tahun 2008 - 2012.

## Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk Panel data (*pooling data*), yaitu gabungan dari data rangkaian runtut waktu Time Series (T) dan data Cros Section (C) yang bersumber melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber, jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian maupun publikasi terbatas dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, serta lembaga atau instansi-intansi lain yang terkait dan mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang dibahas. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Ketimpangan pendapatan di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur;
2. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur;
3. Inflasi di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur;
4. Jumlah penduduk di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

## Metode Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, angka partisipasi kasar dan inflasi terhadap tingkat kesenjangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012 digunakan Analisis Regresi Linier Berganda (*multiple linier regression method*) dengan model panel data dan sebagai alat pengolahan data menggunakan program Eviews 6. Data panel adalah data kombinasi antara deret waktu (*time series*) dan kerat lintang (*cross section*). Data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Sedangkan data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Metode data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan analisis empirik yang tidak mungkin dilakukan jika hanya menggunakan data *time series* maupun *cross section*

(Gujarati, 2004: 637).

Pengujian hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah dengan menggunakan uji t.

## Hasil Penelitian

### Ketimpangan Pendapatan (Indeks Williamson) Jawa Timur

Ketimpangan pembangunan memang merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dan komponen masyarakat. Adapun metode yang digunakan untuk melihat ketimpangan antar wilayah digunakan analisis indeks williamson. Hasil pengujian Indeks Williamson akan menunjukkan nilai antara 0 sampai 1. Dengan semakin besar nilai Indeks Williamson, maka semakin besar ketidakmerataan antar daerah dan sebaliknya semakin kecil nilai Indeks Williamson, maka tingkat ketidakmerataan antar daerah juga akan semakin kecil.

Berikut ini disajikan data ketimpangan pendapatan pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur.

**Tabel 1. Data Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur**

Kabupaten/Kota	IW	Kabupaten/Kota	IW
01. Pacitan	0,200	20. Magetan	0,200
02. Ponorogo	0,240	21. Ngawi	0,240
03. Trenggalek	0,210	22. Bojonegoro	0,280
04. Tulungagung	0,200	23. Tuban	0,250
05. Blitar	0,270	24. Lamongan	0,280
06. Kediri	0,310	25. Gresik	0,220
07. Malang	0,390	26. Bangkalan	0,250
08. Lumajang	0,250	27. Sampang	0,250
09. Jember	0,370	28. Pamekasan	0,240
10. Banyuwangi	0,300	29. Sumenep	0,260
11. Bondowoso	0,190	30. Kota Kediri	0,120
12. Situbondo	0,200	31. Kota Blitar	0,090
13. Probolinggo	0,260	32. Kota Malang	0,170
14. Pasuruan	0,310	33. Kota Probolinggo	0,110
15. Sidoarjo	0,290	34. Kota Pasuruan	0,090
16. Mojokerto	0,240	35. Kota Mojokerto	0,070
17. Jombang	0,280	36. Kota Madiun	0,080
18. Nganjuk	0,260	37. Kota Surabaya	0,180
19. Madiun	0,210	38. Kota Batu	0,090

Sumber: BPS Jawa Timur, data diolah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kota Mojokerto, Madiun, Batu, Pasuruan, dan Blitar merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketidakmerataan yang rendah. Kabupaten Malang, Jember, Kediri, serta Pasuruan merupakan daerah yang memiliki ketidakmerataan tertinggi di Propinsi Jawa Timur.

Ketimpangan pendapatan terjadi di sebagian besar

kabupaten yang memiliki sumber penghasilan daerah yang berasal dari industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran di kabupaten/kota tersebut akan mendorong kenaikan ketimpangan pendapatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Prasetyo (2013) menyatakan bahwa variabel persentase pekerja di sektor industri akan berpengaruh terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan. Perbedaan pendapatan pekerja antara sektor industri dan sektor pertanian akan menimbulkan terjadinya ketimpangan pendapatan di masyarakat.

## Analisis Regresi Data Panel

Pengolahan data dengan model *fixed effect* secara umum dilakukan dengan *Pooled Least Squares*. Hasil regresi antara variabel *independent* pertumbuhan ekonomi (PE), inflasi (INF) dan jumlah penduduk (JP) terhadap variabel *dependent* ketimpangan Pendapatan (IW) di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis menunjukkan PE, INF dan JP berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Dasar pengambilan keputusan yaitu membandingkan antara nilai probabilitas (*p-value*) dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Berikut adalah hasil estimasi persamaan regresi pooled data dengan pendekatan *fixed effect* di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: IW  
Method: Panel Least Squares  
Date: 01/30/15 Time: 18:58  
Sample: 2008 2012  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 38  
Total panel (unbalanced) observations: 189

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	<b>0.017081</b>	0.017833	0.957832	<b>0.3397</b>
PE	<b>0.015208</b>	0.001691	8.994634	<b>0.0000</b>
INF	<b>-0.002983</b>	0.000495	-6.021118	<b>0.0000</b>
JP	<b>1.39E-07</b>	1.28E-08	10.91046	<b>0.0000</b>

Sumber: Lampiran B (diolah)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 2 dengan metode *fixed effect* maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Variabel pertumbuhan ekonomi (PE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (IW) dengan koefisien regresi sebesar 0,015208 serta nilai probabilitas sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari P-value 0,05. Hal ini berarti bahwa apabila variabel PE meningkat 1 persen pertahun menyebabkan IW menurun sebesar 0,015208 persen pertahun di Provinsi Jawa Timur Dengan asumsi inflasi dan jumlah penduduk dianggap konstan.
2. Variabel inflasi (INF) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (IW) dengan koefisien regresi yang negative sebesar -0,002983 serta nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari P-value 0,05. Hal

ini berarti bahwa apabila variabel INF meningkat 1 persen pertahun menyebabkan IW meningkat sebesar 0,002983 persen pertahun di Provinsi Jawa Timur Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk dianggap konstan.

3. Variabel Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (IW) dengan koefisien regresi yang positif sebesar 1,39 serta nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari P-value 0,05. Hal ini berarti bahwa apabila variabel JP meningkat 1 orang pertahun menyebabkan IW meningkat sebesar 1,39 persen pertahun di Provinsi Jawa Timur Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dianggap konstan.

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect* diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$IW = 0,0017081 + 0,015208 PE - 0,002983 INF + (1,39 \cdot 10^{-7}) JP$$

Mengacu pada persamaan regresi tersebut, maka untuk menaikkan ketimpangan pendapatan (IW) dapat dilakukan dengan menaikkan pertumbuhan ekonomi (PE) dan jumlah penduduk (JP), serta menurunkan inflasi (INF). Apabila persamaan regresi tersebut diformulasikan pada masing-masing kabupaten/kota, maka menghasilkan nilai intersep sebagai berikut:

Tabel 3 Estimasi Intersep Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Effect	Kabupaten/Kota	Effect
01. Pacitan	0,023	20. Magetan	0,039
02. Ponorogo	0,033	21. Ngawi	0,040
03. Trenggalek	0,040	22. Bojonegoro	-0,016
04. Tulungagung	-0,009	23. Tuban	0,007
05. Blitar	0,018	24. Lamongan	0,022
06. Kediri	0,018	25. Gresik	-0,037
07. Malang	-0,044	26. Bangkalan	0,048
08. Lumajang	0,033	27. Sampang	0,053
09. Jember	-0,017	28. Pamekasan	0,043
10. Banyuwangi	0,000	29. Sumenep	0,043
11. Bondowoso	0,023	30. Kota Kediri	0,004
12. Situbondo	0,030	31. Kota Blitar	-0,019
13. Probolinggo	0,029	32. Kota Malang	-0,033
14. Pasuruan	0,014	33. Kota Probolinggo	-0,010
15. Sidoarjo	-0,057	34. Kota Pasuruan	-0,014
16. Mojokerto	0,012	35. Kota Mojokerto	-0,031
17. Jombang	0,020	36. Kota Madiun	-0,039
18. Nganjuk	0,035	37. Kota Surabaya	-0,303
19. Madiun	0,045	38. Kota Batu	-0,037

Sumber: Lampiran F

Apabila ketimpangan pendapatan yang tercermin melalui nilai Indeks Williamson (IW) Jawa Timur dikelompokkan berdasarkan nilai estimasi intersep menjadi tiga kelompok yaitu kelompok ketimpangan pendapatan (IW) tinggi, menengah, dan rendah, dengan asumsi variabel independen masing-masing kabupaten/kota bernilai sama, maka

menghasilkan pengelompokan seperti yang disajikan pada Tabel 4 berikut

Tabel 4. Klasifikasi Kelompok Estimasi Intersep Kabupaten/Kota

No.	Kab./Kota	Effect	No.	Kab./Kota	Effect
1	Sampang	0.053	20	Pasuruan	0.014
2	Bangkalan	0.048	21	Mojokerto	0.012
3	Madiun	0.045	22	Tuban	0.007
4	Pamekasan	0.043	23	Kota Kediri	0.004
5	Sumenep	0.043	24	Banyuwangi	0.000
6	Ngawi	0.040	25	Tulungagung	-0.009
7	Trenggalek	0.040	26	Kota Proling.	-0.010
8	Magetan	0.039	27	Kota Pasuruan	-0.014
9	Nganjuk	0.035	28	Bojonegoro	-0.016
10	Ponorogo	0.033	29	Jember	-0.017
11	Lumajang	0.033	30	Kota Blitar	-0.019
12	Situbondo	0.030	31	Kota Mojokerto	-0.031
13	Probolinggo	0.029	32	Kota Malang	-0.033
14	Bondowoso	0.023	33	Gresik	-0.037
15	Pacitan	0.023	34	Kota Batu	-0.037
16	Lamongan	0.022	35	Kota Madiun	-0.039
17	Jombang	0.020	36	Malang	-0.044
18	Kediri	0.018	37	Sidoarjo	-0.057
19	Blitar	0.018	38	Kota Surabaya	-0.303

Sumber: Tabel 3

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa Kabupaten Sampang merupakan daerah di Jawa Timur dengan ketimpangan pendapatan paling tinggi. Sedangkan Kota Surabaya merupakan daerah di Jawa Timur dengan ketimpangan pendapatan paling rendah.

### Uji t-statistik ( uji secara parsial)

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel *independent* terhadap variabel *dependent* ditentukan dengan menggunakan uji t. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 Hasil Uji t-statistik

Variabel	t-statistik	Probabilitas	Keterangan
C	0.957832	0.3397	Tidak Signifikan
PE	8.994.634	0.0000	Signifikan
INF	-6.021.118	0.0000	Signifikan
JP	1.091.046	0.0000	Signifikan

Sumber: Lampiran H (diolah)

Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh masing-masing variabel *independent* sebagai berikut:

1. Bahwa nilai probabilitas  $t_{\text{hitung}}$  variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0000, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ( $\alpha=5\%$ ), maka  $H_0$  ditolak, berarti secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

2. Bahwa nilai probabilitas  $t_{\text{hitung}}$  variabel inflasi sebesar 0,0000, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ( $\alpha=5\%$ ), maka  $H_0$  ditolak, berarti secara parsial variabel inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.
3. Bahwa nilai probabilitas  $t_{\text{hitung}}$  variabel jumlah penduduk sebesar 0,0000, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ( $\alpha=5\%$ ), maka  $H_0$  ditolak, berarti secara parsial variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

### Pembahasan

Ketimpangan pembangunan memang merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dan komponen masyarakat. Adapun metode yang digunakan untuk melihat ketimpangan antar wilayah digunakan analisis indeks williamson. Hasil pengujian Indeks Williamson akan menunjukkan nilai antara 0 sampai 1. Dengan semakin besar nilai Indeks Williamson, maka semakin besar ketidakmerataan antar daerah dan sebaliknya semakin kecil nilai Indeks Williamson, maka tingkat ketidakmerataan antar daerah juga akan semakin kecil.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kota Mojokerto, Madiun, Batu, Pasuruan, dan Blitar merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketidakmerataan yang rendah. Kabupaten Malang, Jember, Kediri, serta Pasuruan merupakan daerah yang memiliki ketidakmerataan tertinggi di Propinsi Jawa Timur.

Ketimpangan pendapatan terjadi di sebagian besar kabupaten yang memiliki sumber penghasilan daerah yang berasal dari industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran di kabupaten/kota tersebut akan mendorong kenaikan ketimpangan pendapatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Prasetyo (2013) menyatakan bahwa variabel persentase pekerja di sektor industri akan berpengaruh terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan. Perbedaan pendapatan pekerja antara sektor industri dan sektor pertanian akan menimbulkan terjadinya ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PE), inflasi (INF), dan jumlah penduduk (JP) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan Pendapatan (IW). Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien regresi untuk pertumbuhan ekonomi ( $b_1$ ) sebesar 0.015208. Nilai tersebut menunjukkan apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1% maka ketimpangan pendapatan Kabupaten atau Kota di Propinsi Jawa Timur akan mengalami peningkatan sebesar 0.015208 dengan asumsi variabel yang lain dianggap konstan (tetap).

Koefisien regresi untuk inflasi ( $b_2$ ) sebesar  $-0.002983$ . Nilai tersebut menunjukkan apabila inflasi meningkat 1% maka ketimpangan pendapatan Kabupaten atau Kota di Propinsi Jawa Timur akan mengalami penurunan sebesar  $0.002983$  dengan asumsi variabel yang lain dianggap konstan (tetap). Menurut (Nopirin, 1987:32) Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan: *equity effect*, sedangkan efek terhadap alokasi faktor produksi, dan produk nasional masing-masing disebut dengan *efficiency dan output effects*.

Koefisien regresi untuk inflasi ( $b_3$ ) sebesar  $1.39 \times 10^{-7}$ . Nilai tersebut menunjukkan apabila inflasi meningkat 1% maka ketimpangan pendapatan Kabupaten atau Kota di Propinsi Jawa Timur akan mengalami peningkatan sebesar  $1.39 \times 10^{-7}$  dengan asumsi variabel yang lain dianggap konstan (tetap). Sumber daya manusia atau penduduk adalah sekumpulan orang atau masyarakat yang ada pada suatu kawasan atau region yang sama (Kuncoro, 2012). Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan pada pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2012 berkisar antara 0,07 sampai dengan 0,39. Kota Mojokerto, Madiun, Batu, Pasuruan, dan Blitar merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketidakmerataan yang rendah. Kabupaten Malang, Jember, Kediri, serta Pasuruan merupakan daerah yang memiliki ketidakmerataan tertinggi di Propinsi Jawa Timur.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten atau Kota di Propinsi Jawa Timur terbukti kebenarannya atau  $H_{a1}$  diterima
3. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten atau Kota di Propinsi Jawa Timur terbukti kebenarannya atau  $H_{a2}$  diterima.
4. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten atau Kota di Propinsi Jawa Timur terbukti kebenarannya atau  $H_{a3}$  diterima.

### Saran

Mengacu pada hasil kesimpulan dan pembahasan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sehingga perusahaan yang menjadi sampel terbatas pada kriteria yang sudah ditetapkan peneliti. Sebaiknya untuk penelitian yang

akan datang menambahkan jumlah sampel dan periode penelitian yang lebih panjang sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi.

2. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan jumlah penduduk terbukti mempengaruhi ketimpangan pendapatan, sehingga pemerintah Jawa Timur dapat membuat kebijakan untuk mengatur kedua variabel tersebut sehingga ketimpangan pendapatan dapat terkontrol dengan baik.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak mengurangi disparitas di Jawa Timur, hal ini sebaiknya dipertahankan. Karena sering kali terjadi saat pertumbuhan ekonomi terus meningkat, kesenjangan pendapatan juga terus meningkat, keadaan demikian dirasakan kurang baik untuk suatu daerah.
4. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel yang akan diteliti. Sehingga variabel yang diteliti nantinya mampu mewakili faktor apa saja yang secara keseluruhan dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

## Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln. (1999). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. BPFE Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln. (2001). *Peramalan Bisnis*. Edisi Satu, BPFE, Yogyakarta.
- Aarsyad, Lincoln.(2004). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta :FEUGM.
- Boediono, 1982. *Ekonomi Makro*. Edisi Keempat, Yogyakarta. BPFE.
- Boediono, 1992, *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu ekonomi, Edisi 1, Cetakan Ke 5*, BPFE, Jogyakarta.
- Coto, Adrian, 2006. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, kontribusi output sektor industri, upahminimum, dan tingkat pendidikan terhadap kesenjangan pendapatan diIndonesia 1993,1996,dan 1999*. Thesis Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan 2006.
- Edwards, Paul et al. (eds.). 1967. *The Encyclopedia of Philosophy (vol. 1 dan 2)*. New York dan London: Collier Macmillan Publisher.
- Ferreira SA, Boley RA. 2006. *Sclerotium rolfsii*. <http://www.extento.edu>. [4 juni 2011
- Gudjarati, D. 2004. *Basic Econometrics*. International Edition. McGraw Hill
- Gujarati,D.1995. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati,D.1997. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan*, Cetakan pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta..

Khuznets, dalam Jhingan, 1994 . *Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang* . jurnal ekonomi.

Marzuki, 2005, *Metodologi Riset, Ekonisia*, Yogyakarta.

Nopirin, 1987. *Ekonomi Moneter buku 2*. Edisi Pertama, Yogyakarta. BPFE.

Oded Galor; Joseph Zeira. *The Review of Economic Studies*, Vol. 60, No. 1. (Jan., 1993), pp. 35-52. Stable URL: <http://links.jstor.org/sici?sici=00346527%28199301%2960%3A1%3C35%3AIDAM%3E2.0CO%3B2-U>

Persson T and G. Tabellini, 1994, *Is Inequality Harmfull For Growth ? Theory and Evidence*, *American Economic Review*, 84(3).

Radinegara, 2011. *Analisis Pengaruh Kondisi Inflasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Pada Negara Berkembang*. Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. 2011.

Sukirno, Sadono, 1994. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Edisi Kedua. Rajawali Press. Jakarta.

Sukirno, Sadono, (2000). *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo persada.

Suparmoko, M, 1998. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. BPFE Yogyakarta.

Supranto, J. 2001. *ekonometrika*. Jakarta :BPFE-UI

Suryana. 2000. *Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.

Sutarno, (2003). *tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas (1993-2000)*. Skripsi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan.

Suryana dkk, 2005 , *Buku Bimbingan dan Pedoman Operasional Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Program Studi Manajemen S-1*, Bandung: FPIPS.

Todaro P Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke-3 Jilid 1*. Jakarta Penerbit Erlangga.

Todaro, M. P. and S. C. Smith. 2003. *Economic Development*. Pearson Addison Wesley, Essex

Waluyo, Joko, 2004, *Hubungan Antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan Dengan Pertumbuhan Ekonomi : Suatu Studi Lintas Negara*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 9 No. 1 Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.